

KESETARAAN RADIKAL DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

(Studi Hermeneutis Pemikiran Jacques Ranciere)

Udji Kayang Aditya Supriyanto
udjias@gmail.com

In Indonesia, new social theory not much developed. As after Habermas, no more. It's important to examine the new social theoretician's thought here. Jacques Ranciere chosen as theoretician who dissected his thought based on outstanding contribution in the discourse of philosophy and social sciences, in addition to other names: Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Ernesto Laclau, or Slavoj Zizek. Compared to them, Ranciere was diligently exploring politics and aesthetics, especially those of equality and democracy. Ranciere's thought on that issue is so important, considering that Indonesia was a democratic country that still need to questioning "equality".

The aim of the research was to explain Jacques Ranciere's thought for all Sociology student in Indonesia, especially his theory about radical equality. The research also tried to look for the possibility of implementing Ranciere's radical equality in the context of Indonesian multicultural society. The research used Ranciere's dissensus theory. Ten theses on politics in the Ranciere's dissensus be a proposition to explain the radical equality. The research is literature study with hermeneutic approach. Data taken from the relevant literature, both written Ranciere itself or by reviewer. Analysis technique of the research is hermeneutical circle that shows dialectic of theory, meaning, and contextualization.

The results of research concluded that Ranciere's thought is significantly contributed in Sociology, he was evaluate and criticize the idea of equality before. Equality according Ranciere, simply, beyond the dichotomy, categorization, and all forms of discrimination. As long as everybody is able to think and speak, then all people are equal. No need to have various partitions and hierarchies. Equality currently problem under consideration in the multicultural society context. Nancy Fraser discern between politics of redistribution and politics of recognition, makes equality in multicultural societies became so crippled. If it's referring politics of redistribution, the politics of recognition is considered not valid, and vice versa. Therefore, Fraser wears overrun on partition and hierarchy, just like Ranciere, as a solution to solve the dilemma of equality in politics. Equality had already been there before to form a variety of partition and hierarchy.

Keyword: radical equality, Jacques Ranciere, dissensus, multiculturalism

A. Pendahuluan

Sejauh ini, peminat Sosiologi belum banyak yang mengenal sosok Jacques Ranciere, apalagi pemikirannya. Dosen-dosen Sosiologi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga belum mulai mendalami, apalagi mahasiswanya. Padahal, sosok Ranciere menjadi penting dalam posisinya sebagai pemikir sosio-politik di zaman ini. Seperti yang jamak diketahui, Sosiologi mengkaji realitas sosial, yang mana merupakan perihal dinamis, bahkan dialektis. Realitas sosial selalu berubah seiring waktu, sehingga teori sosial mestinya juga dikembangkan demi mengejar aktualitas. Secara *das sollen*, asumsi ini tentu saja benar. Semisal pemikiran Karl Marx, wajib diperbarui di zaman ini (salah satunya diupayakan Martin Suryajaya lewat *Mencari Marxisme*). Bila Marx menyebut dua kelas, borjuis dan proletar, nyatanya hari ini kelas sosial semakin kompleks, tak bisa disederhanakan menjadi dua kubu. Tak ada pilihan lain, perkembangan teori sosial yang masif di luar sana harus dirayakan pula di negeri ini.

Memilih Jacques Ranciere sebagai tokoh yang dibedah pemikirannya bukan didasari oleh selera atau ketertarikan personal belaka. Ranciere merupakan satu dari sekian pemikir yang kontribusinya besar dalam pewacanaan filsafat dan ilmu sosial di samping nama-nama tenar lain: Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Ernesto Laclau, dan tentu saja Slavoj Zizek. Dibandingkan nama lainnya, Ranciere lebih tekun menjelajah politik dan estetika, terkhusus menyoal isu-isu kesetaraan dan demokrasi. Pemikiran Ranciere terkait isu tersebut pula yang penting dikaji di sini, sebab Indonesia adalah negara demokrasi yang masih perlu mempertanyakan “kesetaraan”.

Maka jelas sudah, dalam kajian ini pemikiran Ranciere dibenturkan dengan konteks keindonesiaan, satu hal yang sebenarnya tak mudah dilakukan. Indonesia, negara demokrasi dengan masyarakat multikultural, dibedah dengan kacamata Ranciere. Multikulturalisme sendiri mau tak mau identik dengan keberagaman, konsep yang susah akrab dengan kesetaraan. Lantas, mungkinkah Indonesia yang masyarakatnya multikultural ini sanggup mewujudkan kesetaraan? Soal lain yang juga perlu diperhatikan, meski masyarakatnya beragam, namun ada saja identitas

yang dominan, yakni Islam dan Jawa. Identitas dominan di Indonesia termaksud seringkali sulit diarahkan pada ide kesetaraan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Profil dan pemikiran Jacques Ranciere dibedah secara kritis melalui literatur-literatur yang ada, baik itu karya Ranciere sendiri atau karya pengkajinya. Pendekatan yang dipakai adalah hermeneutika, yang dalam penelitian sosial merupakan proses penafsiran melalui dua tingkat. Penafsiran tingkat pertama menunjuk pada pemahaman ihwal sesuatu berdasarkan apa yang dimengerti, dikonsepsikan, dan ditafsir pengarang sendiri (dalam hal ini Ranciere). Sedangkan, pemahaman tingkat kedua lebih merupakan kawasan bermain peneliti untuk mengangkat hasil tafsir tingkat pertama ke dalam bahasa yang tingkatannya lebih tinggi (*meta-language*). Suatu proses penafsiran lebih lanjut dengan melibatkan penggunaan konsep atau konstruksi yang beredar di dalam khazanah dunia keilmuan (Wirawan, 2013: 304). Dalam penelitian ini, gagasan Gadamer ihwal fusi horizon dijadikan kunci analisis. Fusi horizon adalah sintesis antara makna yang diutarakan penulis dengan dimensi penafsir, termasuk di dalamnya wawasan intelektual penafsir.

Mengkaji semua karya Jacques Ranciere satu per satu tentu sulit dilakukan. Untuk lebih mudah mempelajari pemikiran Ranciere, maka diambil tiga sampel karya yang sekira penting untuk dikaji, yakni: *The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation, Disagreement Politics and Philosophy*, dan terutama karya terbarunya *Dissensus (On Politics and Aesthetics)*. Sampel dipilih berdasar tujuan penelitian, dengan kata lain: *purposive sampling*. Data primer dalam penelitian adalah literatur yang terdiri dari tiga karya Ranciere, yakni: *The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation, Disagreement Politics and Philosophy*, dan *Dissensus (On Politics and Aesthetics)*. Beberapa tulisan Ranciere lain, dan karya para penulis yang mengkaji pun turut dijadikan referensi sebagai data sekunder. Referensi tambahan didapatkan lewat observasi langsung untuk memberi gambaran konteks masyarakat multikultural.

C. Hasil dan Pembahasan

Jacques Ranciere lahir di Aljir, Aljazair, pada tanggal 10 Juni 1940. Tidak banyak yang mengetahui kehidupan pribadi Ranciere, semisal masa kecilnya, kisah asmaranya, dan lain-lain. Barangkali, yang perlu publik ketahui tentang Ranciere memang sekadar kiprah intelektualnya. Ranciere adalah salah seorang intelektual dari generasi yang satu dasawarsa lebih muda dari teoretikus Prancis termasyhur pasca-Perang Dunia II, seumpama Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard dan Gilles Deleuze. Satu generasi dengan Ranciere, Alain Badiou adalah sosok terkenal lainnya, yang merupakan salah satu tokoh ampuh yang ditelan arus aktivisme revolusioner dalam peristiwa Mei 1968. Pada tahun tersebut, radikalisasi politik di Prancis memang sedang dalam puncaknya, sedang panas-panasnya.

Pada 1965, saat menginjak usianya yang ke-25 tahun, Ranciere memberikan presentasi panjang dalam seminar yang paling terkenal di zaman itu: kelompok membaca *Das Kapital* Marx, yang diselenggarakan oleh filsuf Marxis seniornya, Louis Althusser, di Ecole Normale Supérieure, Paris. Lanskap intelektual saat itu didominasi oleh referensi klasik nan agung dari Marx, dan tanpa diragukan lagi, Althusser merupakan salah seorang tokoh penting. Ranciere terpukau oleh aura kebesaran Althusser saat itu, sampai di kemudian hari. Sebagaimana yang ditulis Ranciere, dirinya ada “di tengah ketentuan Althusser. Althusser mendeklarasikan perlunya kembali kepada Marx, dalam rangka mencari ketajaman teoritis serta pecahan politisnya (Deranty, dkk., 2010: 2).”

Pada tahun 1969 Ranciere bergabung dengan Fakultas Filsafat yang saat itu baru didirikan, yakni Centre Universitaire Experimental de Vincennes, yang pada gilirannya menjelma University of Paris VIII di tahun 1971. Ranciere tetap ada di sana sampai pensiun sebagai Emeritus Professor of Philosophy di University of Paris-VIII (Saint-Denis) (Bowman & Stamp, 2011: ix). Ranciere lantas dipercaya menjabat sebagai profesor filsafat di European Graduate School, Saas-Fee, Swiss. Pemikiran Ranciere membentang dari filsafat, politik, pendidikan, dan estetika.

Pemikiran kesetaraan Jacques Ranciere berangkat dari kritik terhadap Karl Marx. Dalam *Manifesto Partai Komunis*, Marx bersama Engels menulis, “Sejarah

dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak, partisan dan plebeian, tuan bangsawan dan tani hamba, warga gilda dan magang, pendeknya: penindas dan yang tertindas, selalu ada dalam pertetangan satu dengan yang lain...” (Marx & Engels, 2015: 29). Kelas yang Marx maksud, atau ciptakan, terbagi menjadi dua, yakni borjuis alias kelas kapitalis dan proletar yang tak memiliki penguasaan alat-alat produksi.

Marx masih menstruktur lagi kaum tertindas (nonkapitalis) dalam dikotomi antara *proletariat* dan *lumpenproletariat*, antara yang tertindas secara otentik dan yang tertindas secara tidak otentik, antara kaum tertindas yang punya potensi revolusioner dan kaum tertindas yang punya potensi reaksioner. *Proletariat* ialah kelas buruh pabrik, basis dari seluruh tata ekonomi kapitalis. *Lumpenproletariat*, di sisi lain, ialah kelompok gelandangan, maling, copet, angkatan cadangan tenaga kerja yang merupakan sampah masyarakat, massa pasif yang membusuk, strata terendah masyarakat (Ranciere, 2004: 95).

Konon, dalam situasi revolusioner, *lumpenproletariat* cenderung berpihak pada kelas pemilik modal alias bakal berfungsi sebagai kekuatan paramiliter yang memukul gerakan *proletariat*. Ranciere mempertanyakan diskursus negatif Marx tentang *lumpenproletariat*. Melalui *Das Kapital*, Marx menciptakan *proletariat* sebagai penubuhan dari pikirannya (Marx). Dalam arti, sebagaimana yang ditulis sendiri oleh Ranciere, “proletariat ada hanya karena tercantum dalam Kitab Ilmu Pengetahuan (Ranciere, 2004: 113).” Lain kata, Marx membungkam pengalaman otentik masyarakat tertindas itu sendiri: tidak mengizinkan mereka bersuara atas namanya sendiri, tetapi justru membungkam atas nama sains tentang eksploitasi.

Maka, Ranciere dalam *The Philosopher and His Poor* mengutarakan dua pokok pikiran. Pokok pikiran pertama adalah mengenai representasi. Ranciere mengkritik para pemikir politik, salah satunya tentu saja Marx, yang memberikan hak eksklusif bagi para ilmuwan ekonomi-politik dan kemudian menempatkan kelompok tertindas sebagai pion konseptual dalam sebuah narasi emansipatoris yang lebih besar. Korban seakan harus diwakili/direpresentasikan oleh pihak lain yang lebih intelek. Dengan begitu, ruang bagi narasi korban justru tertutup rapat.

Pokok pikiran kedua adalah tentang titik berangkat dan tujuan emansipasi. Kendati gagasan Marx bertujuan pada realisasi kesetaraan, menurut Ranciere, hal tersebut dicapai dengan prosedur emansipasi yang tidak setara sejak awal mula. Atas nama massa, negara-partai dalam politik sosialisme serta-merta memegang monopoli kewenangan politik. Dengan demikian, Marxisme lantas menempatkan kesetaraan sebagai tujuan alih-alih titik tolak awal. Akibatnya, represi individu atau ketidaksetaraan aktual menjadi dapat dibenarkan demi kesetaraan ideal (Suryajaya, 2016: 151).

Selain Marx yang notabene tokoh Sosiologi klasik, dalam Sosiologi mazhab postmodern pun masih dijumpai diskursus ketidaksetaraan. Sosiolog postmodern yang dikritik oleh Jacques Ranciere adalah Pierre Bourdieu. Kritik tersebut hadir saat Ranciere mengutarakan pemikirannya ihwal pendidikan dalam *The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation*. Bourdieu menyebutkan bahwa anak-anak kelas buruh tak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi oleh karena keterkucilan mereka dari struktur ekonomi kapitalis. Artinya, penindasan atau kekerasan kultural yang mereka alami (tidak bisa sekolah) adalah akibat langsung penindasan ekonominya (sebagai anak kelas buruh) (Hardiman, dkk., 2011: 41).

Ranciere (1991: xi) meringkas logika Bourdieu ihwal pendidikan dalam dua proposisi sebagai berikut: (1) Anak-anak kelas buruh dipinggirkan dari universitas karena mereka tidak paham mengapa mereka dipinggirkan; (2) ketidaktahuan mereka akan peminggiran adalah implikasi struktural sistem yang memproduksi peminggiran itu. Bourdieu dalam pandangan Ranciere bukan hanya bertendensi tautologis, tapi juga memperlihatkan bahwa sosiolog-edukator mengambil jarak dan menempatkan “ketaksetaraan” sebagai titik berangkatnya. Bourdieu alih-alih mencoba berbicara atas nama “kelas buruh”, malah termakan mistifikasi yang dibangun ketidaksetaraan struktur kapitalisme modern sehingga menjadikannya sebagai titik pijakan (Hardiman, dkk., 2011: 41). Bourdieu memulai dari asumsi ketidaksetaraan, lalu bergerak membuktikan ketidaksetaraan dan pada akhirnya balik mengafirmasi ketidaksetaraan dan mengulang terus menerus afirmasi terhadap ketidaksetaraan itu (Hardiman, dkk., 2011: 41).

Ranciere teguh berpendirian setiap orang setara karena kita mampu berpikir dan berbahasa! Pikiran mampu melelehkan segala regulasi dan menantang segala bentuk klasifikasi sosial. Berpikir berarti mensubversi kekakuan tiap-tiap modus distribusi kelas, tempat, dan norma-norma. Berpikir memungkinkan terjadinya *heresy*, yakni *the disturbances of the speaker and disruption of the community* (Robson, dkk., 2005: 26-45). Di titik tersebut kemudian *heresy* dan pemikiran untuk penghancuran partisi dan hierarki membawa Ranciere kepada pemikiran mengenai “yang politis”. Secara umum Ranciere membedakan dua jenis politik: “yang politis” dan “politik” (Hardiman, dkk., 2011: 43).

Politik (*police*) adalah praktik kekuasaan atau penubuhan kehendak dan kepentingan yang mensyaratkan adanya subjek yang saling terbelah dan terbagi ke dalam hierarki dalam sebuah ruang bersama yang nyata. Politik mencipta partisi dari berbagai persepsi dan praktik yang membentuk ruang bersama (*le partage du sensible*). Seturut Ranciere, maka politik (*police*) ialah “*an organizational system of coordinates that establishes a distribution of the sensible or a law that divides the community into groups, social position, and functions* (Ranciere, 2004: 2-3).”

Politik mengatur individu-individu dan kelompok untuk menempati posisi sebagai yang memerintah dan yang diperintah. Politik memisahkan mereka yang dianggap bagian dan mereka yang bukan bagian. Karenanya, muncullah konsep yang politis, sebagai kontras dari politik. Yang politis merupakan segala aktivitas yang memutuskan keterkaitan dengan politik, dengan menemukan subjek baru (Hardiman, dkk., 2011: 44). “*There is politics when there is a part of those who have no part, a part or party of the poor. Politics does not happen just because the poor oppose the rich. It is the other way around: politics (that is, the interruption of the simple effects of domination by the rich) causes the poor to exist as an entity. Politics exist when the natural order of domination is interrupted by the institution of a part of those have no part* (Ranciere, 2004: 11).”

Anggapan Ranciere bahwa pada dasarnya kemampuan setiap orang dalam berpikir dan berbahasa adalah setara, dapat dijelaskan melalui pembagian konsep kesetaraannya. Ia membagi jenis kesetaraan menjadi dua, yakni kesetaraan aktif (*active equality*) dan kesetaraan pasif (*passive equality*). Kesetaraan aktif adalah

perjuangan merampas kesetaraan, sedangkan kesetaraan pasif berarti menunggu kesetaraan diberikan oleh politik (*police*). Kesetaraan aktif dimaksudkan Ranciere sebagai sebarang perjuangan untuk merampas kesetaraan, dengan kata lain subjek (yang politis) berpartisipasi aktif melakukan tindakan di dalam sistem (politik).

Di sisi lain, kesetaraan pasif berarti subjek tak berpartisipasi dalam merebut kesetaraan, yang menjadi haknya. Kesetaraan pasif adalah kesetaraan yang hanya diberikan sistem, alias politik. Pemerintah barangkali mengakui ada keragaman, namun tetap saja mengklasifikasikan subjek, mengatur peran serta posisi mereka. Etnis, peran dan posisi memiliki tempatnya sendiri. Contoh, orang Cina menjadi pedagang, orang Italia menjadi mafia, dan lain-lain. Pengakuan pada keragaman saja menunjukkan ada klasifikasi di dalam masyarakat. Kesetaraan pasif inilah yang menempatkan subjek dalam sekat rigid. Peran serta posisi masing-masing sifatnya telah terberi. Hal ini jadi problematis pada masyarakat multikultural.

Banyak diskusi tradisional tentang kesetaraan mengandung suatu kelemahan mendasar karena menggunakan teori yang salah tentang kodrat manusia. Banyak filsuf memahami manusia menurut teori substantif tentang kodrat manusia dan memperlakukan kebudayaan sebagai sesuatu yang seolah-olah tidak penting atau hanya sebagai kepentingan marginal (Parekh, 2008: 317). Kodrat memungkinkan banyak pihak tersingkir, kehilangan kesetaraan. Misalnya, para LGBT (*lesbian, gay, bisexual, transgender*), mereka dianggap melenceng dari kodrat manusia, dan oleh karena itu, mereka kehilangan kesetaraan dalam masyarakat. Klaim-klaim kodrati semacam ini juga ada dalam tatanan Platonian yang diulas sebelumnya.

Bhikhu Parekh (2008: 318) menambahkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk kodrati, tapi juga sebagai makhluk kultural. Semua manusia mempunyai identitas kemanusiaan umum tapi berada dalam tingkah yang dimediasikan secara kultural. Mereka sama dan berbeda, kesamaan dan perbedaan tidak koeksisten secara pasif tetapi saling menembus dan semua tak mendahului secara ontologis maupun lebih penting secara moral. Kesetaraan, bagi Parekh, tak dapat didasarkan pada keseragaman manusia karena keseragaman manunggal dan secara ontologis tidak lebih penting dari keberbedaan manusia. Membumikan kesetaraan dalam keseragaman juga mengandung konsekuensi yang tidak menguntungkan.

Manusia berbagi sejumlah kemampuan dan kebutuhan umumnya, namun kebudayaan yang berbeda menentukan dan menstrukturkan keberbedaan tersebut dan mengembangkan kemampuan dan kebutuhan baru yang mereka miliki. Jadi, Agak mirip dengan pemikiran Slavoj Zizek ihwal subjek dan kebudayaan. Bagi Zizek, subjek mengalami partikularitas, kemudian kekurangan subjek tersebut diisi oleh kebudayaan. Subjek merupakan sebuah retakan dalam semesta yang secara ontologis konsisten. Subjek bukan bagian yang diambil dari semesta, tetapi lubang dalam semesta. Lubang menganga yang selalu perlu isi dari yang lain. Sebagai ruang kosong, subjek selalu bisa diisi oleh apa pun juga yang ditawarkan sebuah proses yang bernama kebudayaan (Kristiatmo, 2011: 84-85).

Dalam konteks masyarakat multikultural, pemikiran politik filsuf Amerika Serikat kontemporer, Nancy Fraser, dapat dijadikan rujukan. Dalam perdebatan filsafat politik kontemporer, politik didefinisikan setidaknya dengan dua kategori: redistribusi (*redistribution*), dan pengakuan (*recognition*) (Lash & Featherstone, 2002: 21-42). Kategori redistribusi berarti setiap orang menginginkan distribusi kekayaan alam, dalam bentuk modal maupun sumber daya, secara adil dan merata. Sementara kategori pengakuan berarti setiap orang ingin menciptakan masyarakat yang “ramah-terhadap-perbedaan” (*difference-friendly-culture*).

Masyarakat haruslah ditata, sehingga kultur yang minoritas tidaklah harus berasimilasi dengan kultur mayoritas untuk dapat memperoleh pengakuan yang sepantasnya (Wattimena, 2008: 29). Pihak-pihak yang setuju dengan kategori redistribusi menginginkan pembagian kekayaan yang adil merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan, pihak-pihak yang lebih menyetujui kategori pengakuan hendak memperjuangkan pengakuan bagi partikularitas etnis, ras, orientasi seksual dan gender mereka. Dua kutub ini telah menjadi pusat perdebatan di dalam filsafat politik kontemporer (Wattimena, 2008: 29). Dewasa ini, perdebatan antara dua kutub tersebut justru semakin meningkat intensitasnya.

Dalam kasus-kasus perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*recognition*) dari kultur minoritas seringkali terpisah sama sekali dari perjuangan mewujudkan pembagian kekayaan (*redistribution*) yang merata. Perjuangan kaum feminis bisa dijadikan contoh. Bagi kaum feminis, pembagian kekayaan yang adil dan merata

justro semakin memperkuat dominasi kaum laki-laki dalam ruang publik, yakni ketika bantuan dipandang sebagai sumbangan atau belah kasihan semata. Kaum feminis lebih membutuhkan pengakuan, bukan bantuan material. Dalam konteks akademis, pemikir feminis yang melihat gender sebagai konstruksi sosial sering pula berdebat keras dengan para pemikir lain yang melihat gender sebagai suatu bentuk identitas ontologis yang bersifat statis (Wattimena, 2008: 30).

Di satu sisi, gender dipandang sebagai ihwal konstruksi sosial. Peter Berger menyebut konstruksi sosial sebagai proses dialektis terus-menerus dan terdiri dari tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 2013: 176). Sejauh yang berkaitan dengan fenomena masyarakat, momen-momen itu tidak dapat dipikirkan sebagai ihwal yang berlangsung dalam suatu urutan waktu. Sebab, masyarakat dan tiap bagian darinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen tadi. Anggota masyarakat secara serentak mengeksternalisasi keberadaannya dalam dunia sosial dan menginternalisasinya sebagai kenyataan objektif.

Di sisi lain, gender dipandang sebagai identitas ontologis statis yang berarti mengandaikan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan ini jelas terlihat dalam pemikiran Sigmund Freud, tonggak psikoanalisis yang sayang justru dibenci oleh kaum feminis. Di dalam fase *phallic*, anak laki-laki mengalami *castration anxiety*, yaitu menghayati bahwa ayahnya akan mengastrasi penisnya karena niatnya untuk memiliki ibu (alias kondisi *oedipus complex*) (Arif, 2011: 64). Tapi Freud justru mengatakan bahwa anak perempuan dalam fase tersebut mengalami *penis envy*. Perempuan jelas-jelas disubordinasi, diandaikan sebagai manusia yang tak lengkap, hanya karena tak memiliki penis.

Seluruh perdebatan tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai kemunculan gejala baru, yakni terpisahnya politik kultural (*cultural politics*) dari politik sosial (*social politics*), dan terpisahnya politik perbedaan dari politik kesetaraan (*politics of equality*) (Wattimena, 2008: 30). Fraser mengatakan bahwa tendensi pada satu dari dua pilihan tak banyak membantu, yakni keputusan menjadi kubu politik redistribusi atau politik pengakuan. Ia pun berpendapat bahwa kombinasi antara politik redistribusi dan politik pengakuan sangatlah mungkin, dan itu dapat

dilakukan tanpa perlu jatuh ke dalam skizofrenia filosofis. Kombinasi model politik tersebut, menurut Fraser, mestilah diartikan sebagai suatu politik yang melampaui semua bentuk diskriminasi dan subordinasi dengan mengakui semua orang, terlepas dari apapun kelompoknya, sebagai bagian integral di dalam masyarakat, yang mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial (Fraser, 2000: 107-230).

Maka, kesetaraan tak perlu disertakan dalam segala basa-basi ihwal etika. Kesetaraan, menurut Ranciere (2010: 9), bukan esensi, nilai, atau bahkan tujuan ideal yang seringkali coba dicapai oleh etika. *“Equality here is not an essence, a value, or a goal. It is a presupposition of theory and practice...”* Dengan kata lain, Ranciere mengatakan bahwa kesetaraan mesti diandaikan, secara teoretis maupun praktis. Sebab, kesetaraan merupakan kondisi asali setiap manusia. Kesetaraan sama atau justru lebih asali (untuk menghindari istilah kodrati yang sering dipertanyakan) dibandingkan identitas (yang lazim dianggap) ontologis manusia seperti gender, ras, etnis, dan sebagainya.

Sepakat dengan Fraser yang hendak melampaui dikotomi kategori politik kontemporer, Ranciere pun melampaui segala bentuk dikotomi, kategorisasi yang faktual justru membedakan individu. Hal tersebut, menurut Ranciere, justru membuat individu terkotak-kotak dalam partisi dan hierarki, membuat mereka tak setara satu sama lain. Bagi Ranciere, selama semua orang berpikir dan berbahasa, maka semua orang setara. Jadi, acuannya bukan seberapa canggih manusia dapat berpikir, “mampu” saja sudah cukup. Artinya, “mampu” diartikan lebih sebagai *ability*, bukan *skill*. Ditinjau dari kecerdasan, apalagi tingkat pendidikannya, akan terbentuk hierarki yang mengendap dalam status sosial. Namun, jika ditinjau dari kemampuan berpikir dan mengekspresikannya lewat bahasa, semua orang setara, tinggal mereka memilih menjadi “yang politis” atau menjadi musuh-musuhnya?

Dengan pengertian “yang politis” sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, musuh-musuh yang ditengarai menghambat yang politis kemudian dapat dilacak. Robertus Robet, pengkaji Ranciere dan Zizek di Indonesia, menunjuk dua paham, yaitu totalitarianisme dan fundamentalisme sebagai musuh yang politis. Apabila yang politis selalu memiliki dimensi-dimensi intervensi kepada ketakmungkinan,

subjektivitas, kolektivitas, dan imajinasi, maka dengan itu totalitarianisme dapat didefinisikan sebagai perlawanan terhadap yang politis melalui upayanya menutup seluruh ruang imajinasi dan memberikan matriks kuantitatif-positif kepada gejala politik sambil mendefinisikan matriks kuantitatif itu sebagai sepenuh-penuhnya yang kolektif (Robet, 2010: 229).

Totalitarianisme menutup segala imajinasi dengan klaim kolektivitas yang sesungguhnya palsu, oleh karena ia tidak didasarkan kepada kolektivitas dengan multiplisitas yang universal, melainkan pada klaim yang justru partikular macam ras misalnya. Serupa dengan itu, fundamentalisme pun dapat didefinisikan sebagai gerak balik secara penuh ke arah arkhipolitik yang paling arkais dan primitif. Ia mendegradasi imajinasi ke dalam kemurnian hukum-hukum agama, sementara itu ketakungkinan diartika secara dilematis sebagai semata-mata yang transenden tapi dalam identitasnya yang paling terbatas.

Tak ada cara lain, selain gerakan penyadaran kesetaraan lewat yang politis, bersamaan dengan itu, musuh-musuh yang politis mesti pula diberangus. Namun, dari mana yang politis hadir? Ranciere menyebut bahwa kelas yang paling radikal bukanlah kelas yang mengusung cita-cita pembalikan total seluruh tatanan sosial, melainkan justru kelas yang berada dalam situasi atau posisi “migrasi”, kelas yang berada dalam wilayah perbatasan yakni mereka yang memiliki ideal yang mampu melampaui batasan-batasan materialnya (Hardiman, dkk., 2011: 40). Bisa gerakan intelektual kampus, alias berasal dari para akademisi universitas yang mencakup mahasiswa dan dosen. Dapat pula gerakan-gerakan estetis, misalnya musik, film, puisi, sastra, seni rupa, teater, dan sebagainya. Dengan catatan, setiap gerakan yang politis harus berbasis pada kesetaraan!

D. Kesimpulan

Jacques Ranciere adalah seorang pemikir sosial-politik yang pemikirannya membentang dari Filsafat, Sosiologi, Politik, Budaya, Pendidikan, Sastra, sampai Estetika. Bagi Sosiologi, kontribusi pemikirannya cukup signifikan. Sebab, Ranciere mengkritik sekaligus mengevaluasi pemikiran serta teori dari sosiolog sebelumnya yang mengeluarkan gagasan-gagasan terkait isu kesetaraan, misalnya

Karl Marx dan Pierre Bourdieu. Ranciere mengkritik konsep *lumpenproletariat* Marx yang membuat golongan tersebut tersingkir dari politik, menjadi *le part sans-part*. Sedang, Bourdieu dikritik Ranciere berkaitan dengan gagasannya soal pendidikan anak-anak kaum buruh. Bagi Ranciere, pemikiran Bourdieu berangkat dari ketidaksetaraan dan justru mengafirmasi ketidaksetaraan itu, tanpa memberi peluang bagi kesetaraan. Ranciere, selain memberi alternatif baru untuk mazhab post-strukturalisme, juga menyumbang satu teori sosial baru bagi Sosiologi, yakni teori disensus.

Pemikiran kesetaraan Ranciere dapat disebut “kesetaraan radikal” lantaran upaya melampaui segala partisi dan hierarki yang menekankan pada “perbedaan” ketimbang kesetaraan. Selama semua orang mampu berpikir dan berbahasa, maka semua orang setara. Hanya saja, cara tiap orang mengejawantahkan kesetaraannya berbeda-beda. Maka, ada dua jenis kesetaraan, sebagaimana yang Ranciere sebut, yakni: kesetaraan aktif (*active equality*) dan kesetaraan pasif (*passive equality*).

Pemikiran kesetaraan Ranciere belum banyak dipelajari oleh mahasiswa Sosiologi Indonesia. Inilah hal yang sebetulnya menyulitkan pemikiran Ranciere dipakai dalam konteks Indonesia. Bagaimana mungkin menggunakan suatu teori tanpa terlebih dahulu memahami teori itu sendiri? Namun, meski Ranciere sudah banyak dipelajari nantinya, tantangan tetap ada. Sebab, musuh kesetaraan radikal, yakni totalitarianisme dan fundamentalisme, masih marak di negeri ini. Karena itulah, di Indonesia kemungkinan penerapan pemikiran kesetaraan Ranciere masih tersendat-sendat. Terutama karena masih besarnya afirmasi pada musuh-musuh “yang politis”, sekaligus musuh-musuh kesetaraan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Maka, selain menggiatkan studi ihwal kesetaraan, kesadaran bahwa semua orang adalah setara mesti pula ditegaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Iman Setiadi. 2011. *Dinamika Kepribadian: Gangguan dan Terapinya*. Bandung: Refika Aditama
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES
- Bowman, Paul & Richard Stamp. 2011. *Reading Ranciere*. London: Continuum
- Deranty, Jean-Philippe, dkk. 2010. *Jacques Ranciere: Key Concepts*. Durham: Acumen
- Hardiman, F. Budi, dkk. 2011. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: Salihara
- Kristiatmo, Thomas. 2011. *Redefinisi Subjek dalam Kebudayaan: Pengantar Memahami Subjektivitas Modern Menurut Perspektif Slavoj Zizek*, Yogyakarta: Jalasutra
- Lash, Scott & Mike Featherstone (ed.). 2002. *Recognition and Difference: Politics, Identity, and Multiculture*. London: SAGE Publications
- Marx, Karl & Friedrich Engels. 2015. *Manifesto Partai Komunis*. Bandung: Ultimus
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius
- Ranciere, Jacques. 1991. *The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation*. California: Stanford University Press
- Ranciere, Jacques. 2004. *The Philosopher and His Poor*. Durham: Duke University Press
- Ranciere, Jacques. 2004. *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*. London: Continuum
- Ranciere, Jacques. 2010. *Dissensus: On Politics and Aesthetics*. London: Continuum
- Robet, Robertus. 2010. *Manusia Politik: Subyek Radikal dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global Menurut Slavoj Zizek*. Tangerang: Marjin Kiri

Robson, Mark, dkk. 2005. *Jacques Ranciere: Aesthetic, Politics, Philosophy*.
Edinburgh: Edinburgh University Press

Suryajaya, Martin. 2016. *Mencari Marxisme*. Tangerang: Marjin Kiri

Wirawan, I.B. 2013. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana

Jurnal

Fraser, Nancy. 2000. "Rethinking Recognition: Overcoming Displacement and Reification in Cultural Politics," *New Left Review*, Vo. 3, pp. 107-230.

Wattimena, Reza A.A. 2008. "Menuju Pandangan Integratif di dalam Wacana Multikulturalisme: Catatan Singkat atas Filsafat Politik Nancy Fraser," *Diskursus*, Vol. 7 No. 1, pp. 29-60.